



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**RENCANA KERJA
TAHUN 2018**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman kepada Rencana Strategis OPD.

Dengan demikian Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun lalu, meliputi; evaluasi pencapaian target program dan kegiatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang memiliki tugas untuk membantu Kepala

Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagai urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Padang Panjang 2013 – 2018 **“KOTA PADANG PANJANG YANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA ”**.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang didasari kepada :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962).
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4982).
 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
 8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 9. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6)
 10. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang 2017 - 2018, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang , komunikasi dan informatika, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian perizinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang komunikasi dan informatika.
2. Mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2018 dapat terencana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan disamping itu sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2018.

1.4 SistematikaPenulisan

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2016 pada saat tergabung dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2016 terdapat 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) buah kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dan sejalan dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dimana penyusunan program dan kegiatan lebih diarahkan pada penyediaan

kelengkapan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang :

1. Penyebarluasan komunikasi dan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui sarana media Videotron
2. Peningkatan Sistem Informasi di Kota Padang Panjang

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Adapun isu-isu penting yang sangat mendasar sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang antara lain :

1. Sumber daya manusia yang tersedia belum sesuai dengan klasifikasi yang menguasai tugas pokok dan fungsi.
2. Masih kurangnya sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional lapangan dalam rangka penerapan komunikasi dan informatika di lapangan.

3. Masih kurangnya komitmen sumber daya manusia aparatur dalam penegakan disiplin dilapangan
4. Kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran perlu dilengkapi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang disusun dan telah dibahas pada Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) sudah dapat tertata cukup baik dan rapi sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan tidak banyak mengalami perubahan serta ada beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penambahan indikator kinerja, guna menyesuaikan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Komunikasi dan Informasi yang pada awal RKPD belum terakomodir yaitu :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan :
 - a) Naskah akademik tentang komunikasi dan informatika dengan indikator kinerja tersusunnya Ranperda dan Ranperwako bidang bidang kominfo
 - b) pembuatan SPM bidang Kominfo dengan indikator kinerja meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat pada bidang komunikasi dan informatika
- b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
 - a) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan indikator kinerja terlaksananya penyebaran informasi melalui media tradisional dan kelompok informasi masyarakat

- b) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi dengan indikator kinerja tersedianya informasi melalui website Kota Padang Panjang
 - c) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi dengan indikator kinerja terwujudnya jaringan Padang Panjang Smart City yang sudah terintegrasi
 - d) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah indikator kinerja tersebarnya informasi pembangunan daerah dan informasi kepada masyarakat melalui media visual elektronik
 - e) Penayangan dialog interaktif dengan indikator kinerja penyebarluasan informasi terkait isu aktual di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
 - f) Pemberdayaan jaringan komunikasi sosial dengan indikator kinerja terciptanya saluran komunikasi interaktif Pemerintah Daerah dengan Masyarakat
- c. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi.
- a) pengawasan, pengendalian dan penertiban bidang pos dan telekomunikasi dengan indikator kinerja pemetaan dan pengawasan menara komunikasi, warung internet dan jasa titipan kilat.
- d. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- a) pelatihan SDM bidang teknologi informasi dengan indikator kinerja terjadinya peningkatan SDM pegawai di bidang teknologi informasi.

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 telah berupaya menyaring dan menelaah usulan – usulan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.

Usulan – usulan yang disampaikan masyarakat sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan maupun pelaksanaan tahun berikutnya.

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR TAHUN RENSTRA OPD)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2016	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2016	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2017	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8={7/6}	9	10={5+7+9}	11(10/4)
1 07 1 07 01 22 01	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Terjadinya penambahan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang TIK	150	0	30	30	100%	30	60	40%
1 07 1 07 01 22 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan teknologi informasi	Terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan di bidang TIK	750	150	150	150	100%	150	450	60%
1 07 1 07 01 23	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi									
1 07 1 07 01 23 01	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan di bidang postal	5	0	1	1	100%	1	2	40%

Padang Panjang, Maret 2017

Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



BUSMAR CANDRA, S.Kom

Penata Tk. I / NIP. 19760331 200212 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman kepada Rencana Strategis OPD.

Dengan demikian Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahun lalu, meliputi; evaluasi pencapaian target program dan kegiatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang memiliki tugas untuk membantu Kepala

Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagai urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Padang Panjang 2013 – 2018 **“KOTA PADANG PANJANG YANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA ”**.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang didasari kepada :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962).
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4982).
 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
 8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 9. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor6)
 10. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang 2017 - 2018, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang , komunikasi dan informatika, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian perizinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang komunikasi dan informatika.
2. Mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2018 dapat terencana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan disamping itu sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2018.

1.4 SistematikaPenulisan

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2016 pada saat tergabung dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika telah dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2016 terdapat 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) buah kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dan sejalan dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dimana penyusunan program dan kegiatan lebih diarahkan pada penyediaan

kelengkapan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang :

1. Penyebarluasan komunikasi dan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui sarana media Videotron
2. Peningkatan Sistem Informasi di Kota Padang Panjang

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Adapun isu-isu penting yang sangat mendasar sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang antara lain :

1. Sumber daya manusia yang tersedia belum sesuai dengan klasifikasi yang menguasai tugas pokok dan fungsi.
2. Masih kurangnya sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional lapangan dalam rangka penerapan komunikasi dan informatika di lapangan.

3. Masih kurangnya komitmen sumber daya manusia aparatur dalam penegakan disiplin dilapangan
4. Kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran perlu dilengkapi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang disusun dan telah dibahas pada Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) sudah dapat tertata cukup baik dan rapi sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan tidak banyak mengalami perubahan serta ada beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penambahan indikator kinerja, guna menyesuaikan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Komunikasi dan Informasi yang pada awal RKPD belum terakomodir yaitu :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan :
 - a) Naskah akademik tentang komunikasi dan informatika dengan indikator kinerja tersusunnya Ranperda dan Ranperwako bidang bidang kominfo
 - b) pembuatan SPM bidang Kominfo dengan indikator kinerja meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat pada bidang komunikasi dan informatika
- b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
 - a) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan indikator kinerja terlaksananya penyebaran informasi melalui media tradisional dan kelompok informasi masyarakat

- b) Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi dengan indikator kinerja tersedianya informasi melalui website Kota Padang Panjang
 - c) Pengkajian dan pengembangan sistem informasi dengan indikator kinerja terwujudnya jaringan Padang Panjang Smart City yang sudah terintegrasi
 - d) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah indikator kinerja tersebarnya informasi pembangunan daerah dan informasi kepada masyarakat melalui media visual elektronik
 - e) Penayangan dialog interaktif dengan indikator kinerja penyebarluasan informasi terkait isu aktual di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
 - f) Pemberdayaan jaringan komunikasi sosial dengan indikator kinerja terciptanya saluran komunikasi interaktif Pemerintah Daerah dengan Masyarakat
- c. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi.
- a) pengawasan, pengendalian dan penertiban bidang pos dan telekomunikasi dengan indikator kinerja pemetaan dan pengawasan menara komunikasi, warung internet dan jasa titipan kilat.
- d. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- a) pelatihan SDM bidang teknologi informasi dengan indikator kinerja terjadinya peningkatan SDM pegawai di bidang teknologi informasi.

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 telah berupaya menyaring dan menelaah usulan – usulan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.

Usulan – usulan yang disampaikan masyarakat sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan maupun pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

- a. Arah kebijakan nasional Komunikasi dan Informatika : Arah kebijakan umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :
 1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media, dan informatika)
 2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima
 3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika.
- b. Prioritas pembangunan nasional komunikasi dan informatika
 1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong terjadinya sharing/pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana

komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.

2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi, serta menjangkau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggali, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif (information villages).
3. Program prioritas aplikasi informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan pemerintahan (e-goverment) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-goverment nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.

5. Program prioritas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, melalui penelitian dan pengembangan aspek-aspek regulasi, teknologi dan pasar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, bertujuan agar seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terencana dengan baik serta dapat mengakomodir usulan – usulan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan yang sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang diharapkan agar seluruh program dan kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik, sehingga pelaksanaannya dapat dicapai sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang meliputi program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 – 2018 yang meliputi 7 buah program dengan 25 buah kegiatan, adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan ;
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman
 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan ;
 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan ;
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan;
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 3. Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran
 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Program Pengembangan Komunikasi, Informasidan Media Massa, dengan kegiatan;
 1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang
 2. Fasilitasi Pemilihan Media Tradisional
 3. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
 4. Pengadaan dan Operasional Sarana dan Prasarana Data Center/Command Center/Call Center
 5. Pengelolaan dan Perlindungan Informasi dengan pemanfaatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
 6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi
 7. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi
 8. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komite (Komite TIK)
 9. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Padang Panjang
 10. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 11. Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 12. Operasional Maintenance LPSE

13. Penyusunan rencana induk E-Government
 14. Penayangan Dialog Interaktif
 15. Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial
 16. Pengelolaan Konten Videotron
 17. Pengelolaan konten Website
- 7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan;
1. Pelatihan SDM dalam Bidang Teknologi Informasi
- 8) Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, dengan kegiatan ;
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2018 dan perkiraan maju anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 KOTA PADANG PANJANG

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019							
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	URUSAN WAJIB														
1	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		P.Panjang		735,294,000				763,794,000						
1	02	1	02	10	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan meterai dinas		150 lb meterai 3000, 255 lb meterai 6000	1,980,000	ABPD		150 lb meterai 3000, 255 lb meterai 6000	1,980,000
1	02	1	02	10	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya tagihan rekening telepon, air dan listrik		Rek Telp, Air, Listrik kantor, 4 videotron dan running tex	90,600,000	APBD		Rek Telp, Air, Listrik kantor, 4 videotron dan running tex	90,600,000
1	02	1	02	10	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	208,314,000	APBD		12 bulan	208,314,000
1	02	1	02	10	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan		Honor Pengelola Keuangan	80,400,000	APBD		12 bulan	80,400,000
1	02	1	02	10	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan tenaga harian lepas 8 orang		8 orang tenaga harian lepas	170,000,000	APBD		8 orang tenaga harian lepas	170,000,000
1	02	1	02	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		1 Paket	24,000,000	APBD		1 Paket	25,000,000
1	02	1	02	10	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Cetak dokumen kantor, foto copy laporan	20,000,000	APBD		Cetak dokumen kantor, foto copy laporan	20,000,000
1	02	1	02	10	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penerangan gedung kantor		75%	2,500,000	APBD		75%	2,500,000
1	02	1	02	10	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat		24 kali rapat	37,500,000	APBD		24 kali rapat	40,000,000
1	02	1	02	10	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Terikutinya rapat koordinasi dalam dan luar daerah		12 bulan	100,000,000	APBD		12 bulan	125,000,000
1	02	1	02	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		P.Panjang		1,430,000,000				97,600,000

KODE							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	1	02	10	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya transportasi operasional kerja pimpinan dan kerja kantor		3 unit kendaraan roda 4, 8 unit kendaraan roda 2	1,000,000,000	APBD			-
1	02	1	02	10	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya fasilitas perlengkapan gedung kantor		5 unit lemari, 1 unit cash box, 4 unit filling cabinet, 4 unit komputer, 4 unit note book, 4 unit printer, 4 unit ups, 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 12 unit meja rapat, 25 unit kursi rapat, 1 paket gordena	320,000,000	APBD		2 unit filling cabinet, 2 unit komputer, 2 unit note book, 2 unit printer, 2 unit ups	72,600,000
1	02	1	02	10	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor		pembuatan batas ruangan	100,000,000	APBD		pemeliharaan ruangan	15,000,000
1	02	1	02	10	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor	Terpeliharanya alat-alat kantor		Perbaikan Komputer dan Printer	10,000,000	APBD		Perbaikan Komputer dan Printer	10,000,000
1	02	1	02	10	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		P.Panjang		20,000,000				22,500,000
1	02	1	02	10	03	05	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas ASN		40 stel beserta kelengkapannya	20,000,000	APBD		45 stel beserta kelengkapannya	22,500,000
1	02	1	02	10	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		P.Panjang		36,000,000				36,000,000
1	02	1	02	10	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan aparatur		Pelatihan SDM sebanyak 10 orang	36,000,000	APBD		Pelatihan SDM sebanyak 10 orang	36,000,000
1	02	1	02	10	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		P.Panjang		326,000				326,000
1	02	1	02	10	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja OPD		1 Laporan	81,500	APBD		1 Laporan	81,500
1	02	1	02	10	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran		2 Laporan	81,500	ABPD		2 Laporan	81,500

KODE							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	1	02	10	06	03	Penyusunan Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan pronogsis realisasi anggaran		1 Laporan	81,500	APBD		1 Laporan	81,500
1	02	1	02	10	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan Akhir Tahun		1 Laporan	81,500	APBD		1 Laporan	81,500
1	02	1	02	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		P.Panjang		6,608,785,000				6,541,900,000
1	02	1	02	10	15	02	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang Panjang	Terbentuknya Kelompok Informasi masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan		8 Kelompok, Pengadaan 1 unit komputer PC, 1 unit Laptop Macbook, 1 unit Printer Scanner	75,000,000	APBD		4 Kelompok	75,000,000
							Fasilitasi Pemilihan Media Tradisional	Mengikuti Pemilihan Media tradisional Tingkat Propinsi dan Nasional		2 kali pelaksanaan pemilihan	99,785,000	APBD		2 kali pelaksanaan pemilihan	105,000,000
1	02	1	02	10	15	03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Tersedianya bandwith beserta manajemen pengelolaan bandwith untuk seluruh OPD di Lingkungan Pemko Padang Panjang		12 bulan	1,050,000,000	APBD	termasuk 2 tenaga teknis operasional	12 bulan	1,155,000,000
							Pengadaan dan Operasional Sarana dan Prasarana Data Center/ Commend center/ call center	tersedianya Sarana dan Prasarana beserta manajemen pengelolaan Data Center/ Commend center/ call center		1 Paket Data Center/ Commend center/ call center; 12 bulan	2,000,000,000	APBD		1 Paket Data Center/ Commend center/ call center; 12 bulan	1,500,000,000
							Pengelolaan dan Perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	Terlaksananya pengelolaan dan perlindungan informasi dengan pemanfaatan persandian pada semua OPD		24 OPD	125,000,000	APBD		24 OPD	125,000,000
							Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Tersedianya dana operasional dan pemeliharaan untuk jaringan FO, Radio, CCTV dan running text dan penambahan CCTV		12 bulan, 3 titik CCTV baru	325,000,000	APBD	termasuk 2 tenaga teknis operasional	12 bulan	357,500,000

KODE							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	1	02	10	15	05	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Terwujudnya integrasi sistem informasi beserta manajemen pengelolaan Smart City Kota Padang Panjang		Money per triwulan, 10 aplikasi/ sistem informasi, Pengadaan PC All in one 2 unit, Lap top 2 unit, Printer 1 unit, Firewall 1 unit, Wallmounted rack 42 unit	1,500,000,000	APBD	termasuk 2 tenaga teknis operasional	10 aplikasi/ sistem informasi	1,650,000,000
							Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komite (Komite TIK)	Tersusunnya perwako penyelenggaraan E-Gov dan terbentuknya Tim Pengelola E-Gov Kota Padang Panjang		1 Paket	125,000,000	APBD		1 Paket	137,500,000
							Pengelolaan website Pemerintah Kota Padang Panjang	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan website dan tersedianya dana untuk sewa hosting		12 bulan	125,000,000	APBD		12 bulan	137,500,000
1	02	1	02	10	15	11	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dukungan dana untuk pemeliharaan dan perawatan rutin dan berkala beserta manajemen pengelolaan videotron		Pemeliharaan 2 videotron, Pengadaan Tools jaringan 1 paket, Tool FO 1 paket, CCTV 2 unit, Rack Server 1 unit, UPS Server 1 Unit, KVM 1 unit, AC 2 unit, Laptop 2 unit, PC All in one 2 unit	350,000,000	APBD		4 videotron	385,000,000
							Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE, SIRUP, Money, Online)		90 orang (PA, PPK, Pokja ULP, Pejabat Penyedia B/J)	50,000,000	APBD	Pindahan dari Sekdako	90 orang (PA, PPK, Pokja ULP, Pejabat Penyedia B/J)	55,000,000
							Operasional Maintenance LPSE	Terlaksananya proses registrasi, verifikasi, pelelangan/seleksi secara elektronik dan Tersedianya peralatan/perangkat infrastruktur LPSE		Pengadaan peralatan, operasional LPSE	350,000,000	APBD	Pindahan dari Sekdako	Pengadaan peralatan, operasional LPSE	385,000,000
							Penyusunan rencana induk E-Government	Tersedianya dokumen master plan E-Government		1 dokumen	500,000,000	APBD	Program usulan dari Propinsi	-	-

KODE								URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
										LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1								2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02	1	02	10	15	12	Penayangan Dialog Interaktif	Penayangan dialog interaktif pada media televisi		6 kali tayang media televisi lokal, 2 televisi nasional, Pengadaan Komputer PC 1 unit, Laptop Macbook 1 unit, Printer Scanner 1 unit, Kamera DJJ Osmo 1 unit, Stabilizer Glimbal 1 unit, Kamera 1 unit, Lighting Kamera Video 1 unit	230,000,000	APBD	Termasuk 3 tenaga teknis operasional	6 kali tayang media televisi lokal, 2 televisi nasional	250,000,000	
1	02	1	02	10	15	13	Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial	Terlaksananya pengelolaan jaringan sosial media pemerintah kota padang panjang		4 Sosial Media (FB, Instagram, Twitter dan Youtube), Pengadaan Komputer PC 1 unit, Laptop Macbook 1 unit, Drone Phantom 4 Pro + 1 unit	98,000,000	APBD		4 Sosial Media (FB, Instagram, Twitter dan Youtube)	107,800,000	
							Pengelolaan konten Videotron	Terlaksananya pengelolaan konten 4 unit videotron Pemerintah Kota Padang Panjang		60 kali	53,000,000	APBD		60 kali	58,300,000	
							Pengelolaan konten Website	Terlaksananya pengelolaan website Pemerintah Kota Padang Panjang		120 kali	53,000,000	APBD		120 kali	58,300,000	
1	02	1	02	10	17		Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		P.Panjang		200,000,000				220,000,000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02 1 02 10 17 04	Pelatihan SDM Dalam Bidang Teknologi Informasi	terlaksananya bimtek dan training aplikasi bagi aparatur di lingkungan pemko Padang Panjang (Pejabat Struktural eselon II,III,IV,V dan operator OPD)		semua Pejabat Struktural eselon II,III,IV,V dan operator OPD per aplikasi, Pengadaan PC All in one 1 unit, Laptop 2 unit	200,000,000	APBD		semua Pejabat Struktural eselon II,III,IV,V dan operator OPD per aplikasi	220,000,000
1 02 1 02 10 18	Program Kerja sama Informasi dengan Media Massa		P.Panjang		1,880,000,000				1,980,000,000
1 02 1 02 10 18 01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya publikasi kegiatan pembangunan melalui media cetak lokal dan nasional		Langganan 50 media cetak, kerjasama media televisi	1,430,000,000	APBD	Pindahan dari Sekdako	Langganan 50 media cetak, kerjasama media televisi	1,500,000,000
1 02 1 02 10 18 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya permintaan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik kepada masyarakat		12 bulan	150,000,000	APBD	Pindahan dari Sekdako	12 bulan	150,000,000
1 02 1 02 10 18 03	penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang		Cetak buku agenda, kalender, spanduk dan baliho kegiatan Kota Padang Panjang	300,000,000	APBD	Pindahan dari Sekdako	Cetak buku agenda, kalender, spanduk dan baliho kegiatan Kota Padang Panjang	330,000,000
Jumlah					10,910,405,000				9,662,120,000

Pagu : 5.061.745.000,-

Program = 8

Kegiatan = 41

Program/Kegiatan Pindahan dari OPD Sekdako

2,280,000,000

Padang Panjang, Maret 2017

Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



BUSMAR CANDRA, S.Kom
Penata Tk. I / NIP. 19760331 200212 1 002

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang dimulai dari bawah, perencanaan ini diawali dengan rapat forum antara Organisasi Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan Musrenbang Kota Padang Panjang Tahun 2018, hasil Musrenbang disusun untuk Rencana Kerja Kota Padang Panjang yang didalamnya juga termasuk perencanaan penganggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah dapat menyusun rencana kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan pada tahun 2018.

Rencana Kerja ini adalah sebagai penjabaran dari RPJM Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018. Untuk pelaksanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) dijabarkan dalam APBD setiap tahunnya. Dalam dokumen ini secara umum telah memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja, kegiatan disini masih diperlukan penyempurnaan guna peningkatan capaian kinerjanya.

Untuk anggaran tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang akan melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 40 (Empat Puluh) kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, juga dengan melalui kerjasama dengan unit kerja lainnya atau pihak ketiga.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Maret 2017

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Padang Panjang**



BUSMAR CANDRA, S.Kom

Penata Tk. I / NIP. 19760331 200212 1 002

